

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 24, No. 4, Desember 2019

ISSN 0853-9316

- HUBUNGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH:
STUDI PENGGUNAAN MEKANISME KONSULTASI PEMBUATAN KEBIJAKAN DAERAH
oleh: Prayudi
- UPAYA MENGATASI PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA
oleh: Rafika Sari dan Dewi Restu Mangeswuri
- *WORKPLACE WELL-BEING* PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH REFORMASI BIROKRASI
oleh: Sulis Winurini
- PENGARUH DAYA GUNA MASYRAKAT DAN KETRAMPILAN SUPIR ORGANDA
TERHADAP KEBIJAKAN *WIN WIN COLLABORATION* ANTARA ANGKUTAN UMUM
DAN TRANSJAKARTA PROGRAM OK OTRIP
oleh: Ana Ramadhayanti
- TANTANGAN, KENDALA DAN UPAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LISTRIK
DI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
oleh: Achmad Sani Alhusain



Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 24, No. 4, Desember 2019

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	i-ii
● HUBUNGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH: STUDI PENGGUNAAN MEKANISME KONSULTASI PEMBUATAN KEBIJAKAN DAERAH <i>oleh: Prayudi</i>	205-219
● UPAYA MENGATASI PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA <i>oleh: Rafika Sari dan Dewi Restu Mangeswuri</i>	221-232
● <i>WORKPLACE WELL-BEING</i> PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH REFORMASI BIROKRASI <i>oleh: Sulis Winurini</i>	233-246
● PENGARUH DAYA GUNA MASYRAKAT DAN KETRAMPILAN SUPIR ORGANDA TERHADAP KEBIJAKAN <i>WIN WIN COLLABORATION</i> ANTARA ANGKUTAN UMUM DAN TRANSJAKARTA PROGRAM OK OTRIP <i>oleh: Ana Ramadhayanti</i>	247-254
● TANTANGAN, KENDALA DAN UPAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LISTRIK DI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN <i>oleh: Achmad Sani Alhusain</i>	255-270

PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Kajian Vol 24. No. 4 Tahun 2019. Terdapat lima tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan dari baik dari penulis internal Pusat Penelitian maupun penulis eksternal. Tulisan pertama berjudul “Hubungan DPRD dan Kepala Daerah: Studi Penggunaan Mekanisme Konsultasi Pembuatan Kebijakan Daerah”, yang ditulis oleh Prayudi dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Penggunaan mekanisme konsultasi DPRD dan kepala daerah terkait kebijakan daerah mengandung muatan yang belum seimbang dalam konteks relasi sebagai mitra sejajar. Konteks relasi tadi adalah masih dominannya peran dari eksekutif menyangkut inisiatif kebijakan daerah dibandingkan DPRD. Konsultasi menjadi sekedar bersifat formal dan belum menyentuh secara signifikan terhadap upaya penyelesaian persoalan di tingkat lapangan.

Artikel kedua adalah tentang “Upaya Mengatasi Praktik Kartel di Indonesia”, yang ditulis oleh Rafika Sari dan Dewi Restu Mangeswuri dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Artikel ini mengungkapkan perlunya penguatan KPPU diperlukan dalam pemberian kewenangan untuk mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan. Program leniensi sebagai whistle-blower telah diterapkan oleh beberapa negara menjadi insentif bagi para pelaku usaha yang mengakui atau melaporkan perbuatan kartelnya. Program leniensi ini diharapkan dapat diatur dalam mekanisme pengurangan denda atau penghapusan hukum yang jelas dan terperinci, dengan tujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat di Indonesia. Revisi besaran denda administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kartel dan publikasi dalam daftar hitam bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

Tulisan ketiga membahas isu *Workplace Well-Being* dengan judul “*Workplace Well-Being* Pada Pegawai Negeri Sipil Setelah Reformasi Birokrasi”, yang ditulis oleh Sulis Winurini dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Reformasi birokrasi berarti perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan. Setiap perubahan di dalam birokrasi menimbulkan pengalaman baru bagi PNS yang ada di dalamnya. Pengalaman ini kemudian berpengaruh pada kesejahteraan pegawai itu sendiri. *Workplace well-being* (WWB) merupakan konsep yang menjelaskan kesejahteraan pegawai di tempat kerja. Pengembangan sistem merit di dalam kebijakan dan manajemen kepegawaian menjadi upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan pegawai. Dengan sistem merit, akan tercipta lingkungan birokrasi yang sehat dan mendorong tercapainya sasaran reformasi birokrasi. Pengukuran WWB perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi efek dari perbaikan sistem manajemen kepegawaian..

Tulisan keempat ditulis oleh Ana Ramadhayanti dengan judul “Pengaruh Daya Guna Masyarakat dan Keterampilan Supir Organda Terhadap Kebijakan *Win Win Collaboration* Antara Angkutan Umum dan Transjakarta Program Ok Otrip”. *Win-Win Collaboration* antara angkutan umum dan transjakarta memberikan keuntungan tersendiri, satu sisi kehadiran OK OTRIP dengan biaya terjangkau membantu masyarakat dari sisi financial serta disisi lain diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Namun dibalik keunggulan *One Karcis One Tript* menimbulkan permasalahan yakni bahwa supir organda belum memahami penggunaan *One Karcis One Trip*. Keterampilan supir organda dalam menggunakan *One Karcis One Trip* masih sangat rendah. Belum adanya pelatihan penggunaan *One Karcis One Trip* kepada supir organda maka tidak heran jika kehadiran *One Karcis One Trip* belum terlalu banyak di masyarakat..

Tulisan yang terakhir berjudul “Tantangan, Kendala dan Upaya Pembangunan Infrastruktur Listrik di Provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Selatan”, yang ditulis oleh Achmad Sani Alhusain dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Upaya untuk mewujudkan kemajuan ekonomi yang salah satunya melalui penyediaan energi listrik menjadi sangat penting. Pemerintahan Joko Widodo sangat serius untuk mewujudkan ketersediaan energi listrik melalui kebijakan pembangunan infrastruktur listrik yang direncanakan mencapai 35.000 MW pada tahun 2019. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mengimplementasikan rencana ini tidak mudah. Tantangan yang dihadapi utamanya meningkatnya kebutuhan listrik dan kondisi wilayah untuk menjangkau daerah terpencil. Sementara itu, kendala masih dihadapi antara lain pembebasan lahan, perizinan, anggaran pemerintah daerah, koordinasi antarsektor masih menjadi pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Untuk itu perlu adanya terobosan kebijakan terkait kawasan hutan lindung, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan komunikasi agar sinergi antarsektor dapat lebih diperbaiki dan mendorong minat swasta turut terlibat dalam penyediaan energi listrik.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian Vol 24, No. 4 Tahun 2019. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. YB Suhartoko, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si, M.A, Prof. Dr. Dwi Purwoko, Prof. Dr. Achmad Suryana dan Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Desember 2019

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Prayudi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

HUBUNGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH: STUDI PENGGUNAAN MEKANISME KONSULTASI PEMBUATAN KEBIJAKAN DAERAH

Kajian Vol. 24, No. 4, Tahun 2019, hlm. 205-219

Penggunaan mekanisme konsultasi DPRD dan kepala daerah terkait kebijakan daerah mengandung muatan yang belum seimbang dalam konteks relasi sebagai mitra sejajar. Konteks relasi tadi adalah masih dominannya peran dari eksekutif menyangkut inisiatif kebijakan daerah dibandingkan DPeRD. Konsultasi menjadi sekedar bersifat formal dan belum menyentuh secara signifikan terhadap upaya penyelesaian persoalan di tingkat lapangan. Penelitian yang dilakukan terhadap dua daerah, yaitu kasus di DPRD Sumsel dan Kalsel, menunjukkan ketidakseimbangan posisional kelembagaan tadi. Bahkan, konsultasi mudah terjebak pada kompromi antar elit lokal dalam menjaga status quo kepentingan masing-masing. Ini terjadi di tataran pembahasan Raperda, pertanggungjawaban publik pemda, dan di tataran penyelesaian persoalan riil di lapangan. Sehingga, dari temuan penelitian tadi, maka dianggap penting dalam rangka memulihkan mekanisme konsultasi DPRD ke arah yang lebih substantif. Struktur DPRD melalui konsultasi yang dilakukannya diangkat pada kapasitasnya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memiliki daya paksa untuk ditaati oleh eksekutif dan memiliki konsekuensi politik manakala diabaikan.

Kata kunci: Konsultasi, DPRD, eksekutif, kebijakan daerah, pemda.

UPAYA MENGATASI PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA

Kajian Vol. 24, No. 4, Tahun 2019, hlm. 221-232

Kartel merupakan salah satu perilaku pasar anti-persaingan dimana pelaku usaha melakukan perjanjian/koordinasi dengan pelaku usaha pesaing dengan tujuan membatasi atau menghilangkan persaingan. Selama periode tahun 2012 hingga tahun 2017, jumlah perkara yang telah ditangani oleh KPPU adalah sekitar 18 perkara kartel antara lain kartel gula, garam, dan telekomunikasi. Beberapa penelitian di Eropa menunjukkan bahwa praktik kartel berdampak negatif terhadap efisiensi ekonomi sehingga diperlukan kebijakan untuk membatasi atau menghapus praktik kartel ekonomi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa upaya mengatasi praktik kartel di Indonesia, dengan mengkaji perkara praktik kartel yang terjadi di Indonesia berikut sanksi dan kerugian ekonomi yang diakibatkan serta perbaikan regulasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, literatur, media daring, maupun sumber resmi lainnya. Penguatan KPPU diperlukan dalam pemberian kewenangan untuk mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan. Program leniensi sebagai whistle-blower telah diterapkan oleh beberapa negara menjadi insentif bagi para pelaku usaha yang mengakui atau melaporkan perbuatan kartelnya. Program leniensi ini diharapkan dapat diatur dalam mekanisme pengurangan denda atau penghapusan hukum yang jelas dan terperinci, dengan tujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat di Indonesia. Revisi besaran denda administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kartel dan publikasi dalam daftar hitam bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

Kata kunci: Kartel; leniensi; persaingan usaha; KPPU; pembangunan berkelanjutan.

**WORKPLACE WELL-BEING PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH REFORMASI BIROKRASI
(STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)**

Kajian Vol. 24, No. 4, Tahun 2019, hlm. 233-246

Reformasi birokrasi berarti perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan. Setiap perubahan di dalam birokrasi menimbulkan pengalaman baru bagi PNS yang ada di dalamnya. Pengalaman ini kemudian berpengaruh pada kesejahteraan pegawai itu sendiri. Workplace well-being (WWB) merupakan konsep yang menjelaskan kesejahteraan pegawai di tempat kerja. Apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan WWB PNS dan bagaimana gambaran WWB PNS pada instansi pemerintah yang sudah melakukan reformasi birokrasi menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Pengembangan sistem merit di dalam kebijakan dan manajemen kepegawaian menjadi upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan pegawai. Dengan sistem merit, akan tercipta lingkungan birokrasi yang sehat dan mendorong tercapainya sasaran reformasi birokrasi. Sebagian besar partisipan berada pada skor WWB tinggi (54,4%). Lebih spesifik lagi, rata-rata skor dimensi ekstrinsik lebih tinggi dibanding dimensi instrinsik. Apabila dilihat dari domainnya, makna kerja adalah domain dengan skor tertinggi dibanding domain yang lainnya, diikuti kemampuan dan pengetahuan di pekerjaan. Sementara upah yang merupakan bagian dari dimensi ekstrinsik adalah domain dengan skor terendah. Selain itu, tidak terdapat perbedaan skor WWB secara signifikan berdasarkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan rata-rata jam kerja per hari. Pengukuran WWB perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi efek dari perbaikan sistem manajemen kepegawaian.

Kata kunci: reformasi birokrasi, sistem merit, kesejahteraan pegawai di tempat kerja.

PEGARUH DAYA GUNA MASYARAKAT DAN KETRAMPILAN SUPIR ORGANDA TERHADAP KEBIJAKAN *WIN WIN COLLABORATION* ANTARA ANGKUTAN UMUM DAN TRANSJAKARTA PROGRAM OK OTRIP

Kajian Vol. 24, No. 4, Tahun 2019, hlm. 247-254

Memasuki awal tahun 2018 program kebijakan pemerintah Sistem One Karcis One Trip (OK OTRIP) hadir dimasyarakat. One Karcis One Trip (OK OTRIP) merupakan perpaduan antara angkutan umum dan transjakarta. Win-Win Collaboration antara angkutan umum dan tranjakarta memberikan keuntungan tersendiri, satu sisi Kehadiran OK OTRIP dengan biaya terjangkau membantu masyarakat dari sisi financial serta disisi lain diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Namun dibalik keunggulan One Karcis One Triptmenimbulkan permasalahan yakni bahwa supir organda belum memahami penggunaan One Karcis One Trip. Keterampilan supir organda dalam menggunakan One Karcis One Trip masih sangat rendah. Belum adanya pelatihan penggunaan One Karcis One Trip kepada supir organda maka tidak heran jika kehadiran One Karcis One Trip belum terlalu banyak di masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh daya guna masyarakat dan supir organda terhadap kebijakan win-win collaboration antara angkutan umum dan TransJakarta dalam menggunakan kartu OK OTRIP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan pengumpulan data melalui pembagian kuesioner kepada para pengguna One Karcis One Trip. Sementara itu olah data digunakan dengan perhitungan menggunakan software (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Kebijakan Win-Win Collaboration Angkutan Umum dan Transjakarta Terhadap Daya Guna Masyarakat dan Keterampilan Supir Organda Dalam Penggunaan Uji Coba Kartu One Karcis One Trip (OK OTRIP). Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah dan pengguna One Karcis One Trip (OK OTRIP). Sebaiknya lebih spesifik masukannya.

Kata kunci: One Karcis One Trip, OK OTRIP, Organda, Transjakarta.

TANTANGAN, KENDALA DAN UPAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LISTRIK DI PROVINSI RIAU DAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kajian Vol. 24, No. 4, Tahun 2019, hlm. 255-270

Upaya untuk mewujudkan kemajuan ekonomi yang salah satunya melalui penyediaan energi listrik menjadi sangat penting. Pemerintahan Joko Widodo sangat serius untuk mewujudkan ketersediaan energi listrik melalui kebijakan pembangunan infrastruktur listrik yang direncanakan mencapai 35.000 MW pada tahun 2019. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mengimplementasikan rencana ini tidak mudah. Oleh karena itu, tulisan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur listrik yang sudah direncanakan dan mengetahui apa saja kendala/tantangan yang masih dihadapi khususnya di provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasilnya dijelaskan secara deskriptif. Secara umum perkembangan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur listrik sampai pertengahan tahun 2017 memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi utamanya meningkatnya kebutuhan listrik dan kondisi wilayah untuk menjangkau daerah terpencil. Sementara itu, kendala masih dihadapi kedua provinsi antara lain pembebasan lahan, perizinan, anggaran pemerintah daerah, koordinasi antarsektor masih menjadi pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Berdasarkan temuan di kedua provinsi ini, perlu adanya terobosan kebijakan terkait kawasan hutan lindung, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan komunikasi agar sinergi antarsektor dapat lebih diperbaiki dan mendorong minat swasta turut terlibat dalam penyediaan energi listrik.

Kata kunci: tantangan, kendala, pembangunan, infrastruktur, energi, listrik.

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Prayudi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

**RELATION BETWEEN DPRD AND REGIONAL HEAD:
STUDY OF CONSULTATION MECHANISM FOR REGIONAL POLICY MAKING**

Kajian Vol. 24, No. 4, Tahun 2019, p. 205-219

Utility of DPRD's consultation mechanism related to the regional policies contain of imbalances in an equal partners context. These context relations is still dominate by an executive roles compared to the DPRD's. Consultation become just like too formal and yet to touch the efforts to solve the problems in the field. Research which conducted to the two regions, that is of DPRD's South Sumatera and South Kalimantan, showed that an institutional imbalances. Even consultation easy to trap of compromise each vested interest status quo mantaining among the local elite. These happen in the level of draft local legislation deliberation, public accountability of regional governance, and level of the real problem solution. Therefore, based on the research finding, then to restore consultation mechanism direction to more substatives. Structure of DPRD's of consultation to improved their capacity to produce policy recomendations which have force coercion to obey by an executive and have political consequences when to ignore it.

Keywords: Consultations, Local Parliament, executives, regional policy, regional government.

EFFORT TO DISCLOSE CARTELS IN INDONESIA

Kajian Vol. 24, No. 4, Tahun 2019, p. 221-232

Cartel is an anti-competitive market behavior that agreements between competitors to prevent, restrict or distort competition. During the period of 2012 until 2017, the number of cases handled by KPPU was around 18 cartel cases, including sugar, salt, and telecommunications cartels. Several studies in Europe have shown that cartels have a negative impact on economic efficiency, so policies are needed to limit or eliminate cartels in Indonesia. This paper aims to analyze efforts to disclosure cartels in Indonesia, by examining cartels cases in Indonesia along with sanctions and economic losses caused and the competition law amendments. This paper uses a descriptive qualitative approach with secondary data sources from journals, literature, online media, and other official sources. To strengthen of KPPU is needed in granting authority to obtain, examine and / or assess letters, documents, or other evidence for investigation or examination. The leniency program as a whistle-blower has been implemented by several countries as an incentive for anyone who exposes insider knowledge of illegal business activities. This leniency program is expected to be regulated in detailed mechanism for reducing fines or punishments, with the aim of creating a fair business competition in Indonesia. The regulation of the cartel provides access to justice in business competition for sustainable development. Revised cartels fines and blacklisting are included in the competition law amendment.

Keywords: *Cartel; leniency; business competition; KPPU; sustainable development.*

**WORKPLACE WELL-BEING IN GOVERNMENT EMPLOYEES AFTER BUREAUCRATIC REFORM
(CASE STUDY: THE GOVERNMENT OF YOGYAKARTA CITY)**

Kajian Vol. 24, No. 4, Tahun 2019, p. 233-246

Bureaucratic reform means a change of paradigm and governance. Every change in the bureaucracy raises new experiences for civil servants who are in it. This experience then affects the welfare of the employee itself. Workplace well-being (WWB) is a concept that explains the welfare of employees at work. What are the efforts that have been made by the government to improve the WWB and how the description of WWB to government agencies that have carried out bureaucratic reform are the questions in this study. The development of a merit system in staffing policies and management is the government's effort to realize employee welfare. With a merit system, a healthy bureaucratic environment will be created and will encourage the achievement of bureaucratic reform goals. Most of the participants had high WWB scores (54.4%). More specifically, the average score of the extrinsic dimension is higher than the intrinsic dimension. When viewed from the domain, the meaning of work is the domain with the highest score compared to other domains, followed by ability and knowledge at work. While wages that are part of the extrinsic dimension are the domain with the lowest score. In addition, there were no significant differences in WWB scores based on sex, age, marital status, last education, length of work, and average hours worked per day. WWB measurements need to be carried out on an ongoing basis to identify the effects of improving the personnel management system.

Keywords: *Bureaucratic reform, merit system, workplace well-being.*

**THE INFLUENCE OF COMMUNITY USABILITY AND ORGANDA SUPPLY SKILLS
ON WIN WIN COLLABORATION POLICY BETWEEN PUBLIC TRANSPORT
AND TRANSJAKARTA OK OTRIP PROGRAM**

Kajian Vol. 24, No. 4, Tahun 2019, p. 247-254

Entering the beginning of 2018 the government policy program One Karcis One Trip System (OK OTRIP) is present in the community. One Karcis One Trip (OK OTRIP) is a combination of public transport and Transjakarta. Win-Win Collaboration between public transport and Jakarta provides its own advantage, one side of OK OTRIP's presence with affordable costs helps the community from the financial side and on the other hand is expected to reduce congestion. But behind the superiority of the program, one problem arises the problem of original drivers who have not understood the use of OK OTRIP. The skills of the driver in using One Car One One are still very low. The absence of training on the use of OK OTRIP for organda drivers is not surprising if the presence of OK OTRIP is not too much in the community. Therefore, this study aims to find out the extent of the influence of Win-Win Collaboration between public transport and tranjakarta on community use and skills of original drivers in using the OK OTRIP card. The research method used is Quantitative research by distributing questionnaires to users of One Karcis One Trip. Meanwhile data processing is used by using (SPSS) software. The results of the study show that there are positive and significant influences between the Win-Win collaboration between Public and Transjakarta Transport Policy on Community Empowerment and Skills of the Double Driver in Using the Trial One Trip Card (OK OTRIP). It is hoped that this research can be input to the government and users of One Karcis One Trip (OK OTRIP).

Keywords: *One Ticket One Trip, OK OTRIP, Organda, Tranjakarta.*

CHALLENGES, CONSTRAINTS AND EFFORTS FOR DEVELOPMENT OF ELECTRICITY INFRASTRUCTURE IN RIAU PROVINCE AND SOUTH SULAWESI PROVINCE

Kajian Vol. 24, No. 4, Tahun 2019, p. 255-270

Efforts to create economic progress, one of which through the provision of electrical energy becomes very important. Joko Widodo's government is very serious in establishing the availability of electricity through the policy of electricity infrastructure development which is planned to reach 35,000 MW in 2019. However, it cannot be denied that implementing this plan is not easy. Therefore, this study aims to find out how electricity infrastructure development that has been planned and find out what obstacles/challenges are still being faced particularly in Riau Province and South Sulawesi Province. This research uses qualitative methods and the results are described descriptively. In general, the implementation of electricity infrastructure development policies until mid-2017 shows positive progress. However, challenges faced particularly increasing electricity demand and the condition of the region to reach isolated areas. Meanwhile, obstacles still faced in both province among others land acquisition, licensing, local government budgets, inter-sectoral coordination still an imposition to be immediately resolved. Base on finding in these two provinces, there needs to be a breakthrough in policies related to protected forest areas, central and regional governments must improve communication so that synergy between sectors can be further improved and encourage private interest to be involved in the supply of electricity.

Keywords: *challenges, obstacles, development, infrastructure, energy, electricity.*